PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Sabtu Tanggal: 19 November 2022 Halaman: 1

BIRO TAPEM SETDA DIY

Partisipasi Masyarakat, Ikut Sukseskan Pemilu

YOGYA (KR) - Masyarakat memiliki peran penting dalam hal kesuksesan Pemilu. Terutama dari segi partisipasi. Untuk itu dibutuhkan kerja sama semua pihak, guna bisa mengajak masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Hal tersebut yang melatarbelakangi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk menyelenggarakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2024, 'Peran Aparatur Pemerintahan Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan dalam Pemilu 2024' di Hotel Khas Malioboro, Kamis (17/11).

Menurut Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Tapem Setda DIY Nur Legawa, meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya pada tingkat kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan dalam penyelenggaraan Pemilu, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan.

"Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi. Karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat," ujarnya ketika membuka acara.

Ditambahkannya, aparatur Pemerintah Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan yang notabene adalah ASN tentu harus netral dalam Pemilu.

* Bersambung hal 7 kol 1

KR-Atiek Widyastuti H

Peserta Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2024, Peran Aparatur Pemerintahan Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan dalam Pemilu 2024.

Partisipasi

Sambungan hal 1

ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Adapun aparatur Pemerintahan Kalurahan dimana di dalamnya adalah Lurah, Pamong Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan juga menjadi perhatian khusus terkait netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilu seperti yang tercantum dalam Pasal 29, 51, dan 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. "Bahwa Lurah dan Pamong Kalurahan dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah," jelasnya.

Sosialisasi menghadirkan Anggota Komisi A DPRD DIY M Syafi'i, Ketua Bawaslu DIY Sutrisnowati dan Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan.

Anggota Komisi A DPRD DIY M Syafi'i mengatakan, dalam setiap pelaksanaan Pemilu diharapkan dapat mengubah kondisi bangsa ke arah lebih baik. Apalagi dana yang digelontorkan sangat besar, mencapai puluhan triliun. "Ini sangat besar. Jangan sampai hasilnya hanya menyisakan konflik saja. Menjadi PR bersama bagaimana kita bisa menghilangkan kata konflik dalam benak," ujarnya.

Dari KPU DIY lebih banyak menjelaskan mengenai isu-isu strategis tentang peraturan KPU tentang pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggara Pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dijelaskan Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, munculnya peraturan KPU tersebut merupakan penggabungan antara regulasi pembentukan dan tata kerja badan Adhoc Pemilu dengan regulasi pembentukan dan tata kerja badan Adhoc pemilihan.

"Penggabungan ini bertujuan untuk penyesuaian visi keserentakan dengan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola Badan AdHoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Selain itu juga penyesuaian hasil evaluasi pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya," katanya.

Ketua Bawaslu DIY Sutrisnowati mengungkapkan, politik uang masih menjadi tantangan terbesar pada Pemilu maupun Pilkada 2024. Di samping itu masih adanya diisformasi, hoaks, politisasi sara, ujaran kebencian hingga netralitas ASN/TNI/Polri/Aparatur Pemerintah Desa.

(Awh)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005